

**Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batu Bara Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Tata Negara**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

FIKRI HAIKAL RAHMAN

2213030167

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1448 H / 2026 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 4 September 2026

Yang Menyatakan,



Fikri Haikal Rahman

NIM. 2213030167

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Haikal Rahman

Nim : 2213030167

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral
dan Batu Bara Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Maliyah*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan
akademik pada fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 4 September 2026

Yang Menyatakan



Fikri Haikal Rahman

NIM. 2213030167

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Maliyah***" yang disusun oleh **Fikri Haikal Rahman** NIM 2213030167 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 28 Agustus 2026
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag.
NIP. 197901042005011006

Pembimbing II



Dr Eskarni Ushalli, Lc. MA
NIP. 198602242018011001

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Pertambangan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Siyasaah Maliyah** yang disusun oleh **Fikri Haikal Rahman, NIM 2213030167**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 16 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Nehwawarni, M.Ag. Ph.D.
NIP 197106151997032001
Penguji I

Yecky Bus, M.Ag.
NIP 197807012006041003
Penguji II

Dr. Rahmat Hidayat. M.Ag
NIP 197901042005011006
Penguji III / Pembimbing I

Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A.
NIP 198602242018011001
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari' ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag.
NIP 197212131998031001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Siyasaah Maliyah.”** Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman sebagaimana yang dirasakan hingga saat ini.

Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhususnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta, Amiruddin, S.Pd., yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberikan semangat dan cintanya kepada penulis, yang selalu memberikan kepercayaan kepada penulis agar mampu melewati pahit manisnya kehidupan perkuliahan.

Selanjutnya kepada almarhumah Ibu, terima kasih atas kasih sayang, perjuangan, dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis selama hidupnya. Meskipun Ibu tidak lagi berada di sisi penulis, kasih sayang dan perjuangan Ibu akan selalu menjadi bagian dari kehidupan dan motivasi penulis untuk terus melangkah. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa almarhumah Ibu, menerima seluruh amal kebbaikannya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Dan tak lupa, kepada kakak dan adik tersayang, Aulifya Mirna, S.Akun., dan Anggun Mirna, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang, kebersamaan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk saling menjaga, menyayangi, dan membahagiakan satu sama lain

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi, serta doa, baik secara moril maupun materil. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurul Shalihin, M.Si., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Nelmawarni, S.Ag., M.Hum., Ph.D., beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN Imam Bonjol Padang.

2. Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H., serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag., yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kepada penulis selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Eskarni Ushalli, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Pembimbing II, sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan ilmu, arahan, bimbingan, nasihat, serta perhatian kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pelayanan, serta bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Kepada seluruh keluarga besar penulis, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama penulis menjalani pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, diskusi, dukungan, serta berbagai cerita yang telah dilalui bersama selama menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

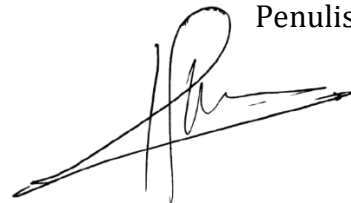
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca serta dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang **Hukum Tata Negara dan *siyasah maliyah***, serta menjadi bahan kajian mengenai keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah SWT agar setiap bantuan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh pihak mendapatkan balasan yang terbaik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari amal kebaikan. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn*.

Padang, [04 september 2026]

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fikri Haikal Rahman', written in a cursive style.

FIKRI HAIKAL RAHMAN
NIM. 2213030167

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara, namun pengelolaannya tidak sepenuhnya dilakukan negara secara langsung, melainkan melibatkan pihak swasta melalui izin usaha pertambangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*) dalam perspektif *siyasah maliyah*, sebab dalam konsep tersebut sumber daya yang dibutuhkan masyarakat luas tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu atau kelompok tertentu. Penelitian ini berfokus pada dua persoalan, yaitu bagaimana regulasi bentuk keterlibatan pihak swasta dalam pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia, serta bagaimana pandangan *siyasah maliyah* terhadap bentuk keterlibatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahannya, serta bahan hukum sekunder berupa pemikiran ulama fikih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan swasta melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan hak perusahaan yang menyerupai *iqta'* berstatus hak pakai sehingga pada dasarnya dapat dibenarkan, selama lahan pertambangan itu tidak memiliki karakteristik *milikiyah ammah*. Namun, ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan hak kepemilikan penuh atas hasil tambang kepada pemegang izin perlu dikritisi karena berpotensi menggeser kedudukan sumber daya sebagai *milkiyah 'ammah* menjadi penguasaan privat, sehingga skema bagi hasil dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan distribusi kekayaan dalam Islam serta mempertahankan kendali negara demi kemaslahatan masyarakat secara luas.

Kata Kunci: keterlibatan swasta, pertambangan mineral dan batu bara, *siyasah maliyah*, *milkiyah 'ammah*, *iqta'*

ABSTRACT

Indonesia possesses significant potential in the management of mineral and coal natural resources. However, their management is not carried out entirely by the state directly, but also involves private parties through mining business licenses. This condition raises questions regarding its conformity with the principle of public ownership (*milkiyah 'ammah*) from the perspective of *siyasah maliyah*, as this concept holds that resources required by the wider community should not be exclusively controlled by particular individuals or groups. This research focuses on two issues: first, how the regulation of forms of private-sector involvement in mineral and coal mining in Indonesia is structured; and second, how *siyasah maliyah* views such forms of involvement. This research constitutes normative legal research (*library research*) employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary legal materials consist of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Mineral and Coal Mining Law and its amendments, while the secondary legal materials consist of the views of Islamic jurists on *fiqh siyasah*. The results of the research indicate that private-sector involvement through Mining Business Licenses (IUP) and Special Mining Business Licenses (IUPK) constitutes a right to exploit natural resources that resembles *iqta'* in the form of a right of use and, in principle, may therefore be justified, provided that the mining area does not possess the characteristics of *milkiyah 'ammah*. However, Article 92 of the Mineral and Coal Mining Law, which grants full ownership of mining products to license holders, requires critical examination because it has the potential to shift the status of natural resources from *milkiyah 'ammah* to private control. Consequently, a profit-sharing scheme is considered more consistent with the principle of distributive justice in Islam while maintaining state control for the broader welfare of society.

Keywords: *private sector involvement, mineral and coal mining, siyasah maliyah, milkiyah 'ammah, iqta'*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Signifikasi Penelitian	5
1.6 Studi Literatur.....	6
1.7 Landasan Teori.....	10
1.8 Metode penelitian.....	14
BAB II KONSEP HARTA PUBLIK DALAM SIYASAH MALIYAH.....	18
2.1 Khazanah Pemikiran Islam yang Digunakan	18
2.2 <i>Siyasah maliyah</i>	22
2.1.1 Pengertian <i>Siyasah Maliyah</i>	22
2.1.2 Ruang Lingkup <i>siyasah maliyah</i>	23
2.1.3 Prinsip <i>siyasah maliyah</i>	24
2.3 Konsep Kepemilikan dalam Hukum Islam.....	28
2.2.1 Pengertian Kepemilikan (<i>Al-Milkiyah</i>).....	28
2.2.2 Klasifikasi Kepemilikan dalam Islam.....	29
2.4 Konsep <i>milkiyah 'ammah</i> dalam Hukum Islam.....	32
2.3.1 Pengertian Dan Dasar Hukum <i>milkiyah 'ammah</i>	32
2.3.2 Objek-Objek dan Karakteristik dan <i>milkiyah 'ammah</i>	34
2.3.3 Pengelolaan <i>milkiyah 'ammah</i> oleh Negara dalam <i>siyasah maliyah</i> ..	37

2.5 Pertambangan dalam Perspektif Hukum Islam.....	40
2.4.1 Pengertian Pertambangan (Ma'din) dalam Fikih Islam	40
2.4.2 Klasifikasi Pertambangan dan Implikasi Hukumnya dalam Fikih	42
BAB III PENGATURAN PERTAMBANGAN DAN KETERLIBATAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA.....	51
3.1 Konsep Hak Menguasai Negara dalam Pengelolaan Pertambangan	51
3.1.1 Dasar Konstitusional Pengelolaan Pertambangan	51
3.1.2 Konsep Hak Menguasai Negara (HMN)	53
3.1.3 Fungsi Negara dalam Pengelolaan Pertambangan.....	55
3.2 Bentuk Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pertambangan Mineral dan Batubara	59
3.2.1 Kedudukan Pihak Swasta dalam Sistem Pertambangan Indonesia...	59
3.2.2 Dasar Hukum Keterlibatan Swasta dalam Pertambangan.....	62
3.2.3 Bentuk Keterlibatan Swasta Melalui IUP	64
3.2.4 Bentuk Keterlibatan Swasta Melalui IUPK.....	66
3.2.5 Keterlibatan Swasta Melalui Penanaman Modal Asing (PMA)	68
3.2.6 Keterlibatan Swasta Melalui Usaha Jasa Pertambangan.....	69
3.3 Hak dan Kewenangan Pihak Swasta dalam Pertambangan Mineral dan Batubara	71
3.3.1 Hak Pihak Swasta	71
3.3.2 Kewajiban Pihak Swasta.....	73
3.3.3 Status Hukum Hasil Tambang yang Dikelola Pihak Swasta	76
BAB IV ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP KETERLIBATAN PIHAK SWASTA DALAM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA.....	80
4.1 Analisis Regulasi Bentuk Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.....	80
4.2 Pandangan <i>siyasah maliyah</i> terhadap Bentuk Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia	82
4.2.1. Kedudukan Mineral dan Batu Bara dalam <i>Siyasah Maliyah</i>	82

4.2.2. Analisis Kesesuaian Pemberian, IUP dan IUPK kepada Pihak Swasta dengan Perspektif <i>Iqta'</i>	88
4.2.3. Analisis Kesesuaian Pemberian Hak Kepemilikan atas Hasil Tambang kepada Pemegang IUP/IUPK Berdasarkan Pasal 92 UU Minerba dengan Perspektif <i>siyasah Maliyah</i>	97
BAB V PENUTUP	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109